

PERKEMBANGAN PT. POS INDONESIA CABANG PALEMBANG MASA ORDE BARU PERIODE PELITA TAHUN 1966

Dewi Setyawati

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Palembang
destya11@gmail.com

Abstrak

Pos merupakan salah satu artefak peradaban yang universal. Kehadirannya sangat erat dengan tumbuh berkembangnya peradaban pada masyarakat. PT. Pos Indonesia (Persero) adalah bagian dari jejaring perposan dunia. Penelitian ini dilakukan atas keinginan penulis untuk mengetahui perkembangan Perseroan Terbatas Pos Indonesia Cabang Palembang, untuk mengetahui fungsi layanan pos dan upaya peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat. Adapun metode yang digunakan adalah metode historis melalui tahap heuristik, kritik sumber yang terbagi menjadi kritik ekstren dan intern, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menjelaskan perkembangan sejarah Perusahaan Umum Pos dan Giro hingga menjadi Perseroan terbatas Pos Indonesia, kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Direktur Pos dan Giro pada masa orde baru Periode Pelita (Pembangunan lima tahun) dalam meningkatkan fungsi serta kualitas pelayanan Pos. Dari hasil penelitian didapatkan peningkatan perkembangan dari Perseroan Terbatas Pos Indonesia Cabang Palembang dapat memudahkan masyarakat menggunakan

Kata kunci: perseroan terbatas, pos indonesia, cabang palembang, pelayanan

Abstract

Post is one of the universal civilization artifacts. Its presence is very close to the development of civilization in society. PT. Pos Indonesia (Persero) is part of a global exposure network. This research was conducted on the wish of the author to find out the development of the Pos Indonesia Palembang Limited Company, to find out the function of the postal service and efforts to improve the quality of services for the community. The method used is the historical method through the heuristic stage, source criticism which is divided into extreme and internal criticism, interpretation and historiography. The results of the study explain the historical development of the Post and Giro Public Companies to become a limited company of Pos Indonesia, then the policies issued by the Post and Giro Directors during the New Order period Pelita 1966 in improving the function and quality of Postal services. From the results of the study, it was found that the increase in the development of the Pos Indonesia Palembang Limited Company was able to facilitate the public to use the services issued by the Pos which followed the times.

Keywords: limited liability company, pos indonesia, palembang branch, services

Pendahuluan

Sejarah perkembangan pos merupakan sejarah khusus yang dapat di katakan tidak pernah disinggung dalam sejarah umum atau sejarah dunia. Padahal, sejarah Pos mengisahkan sebagian sejarah perhubungan manusia atau sejarah komunikasi. Sejarah Pos merupakan

sumber pengalaman manusia dalam masalah tulis menulis, pengangkutan penyampaian surat dan penerimaan surat Riwayat keberadaannya sama tuanya dengan keberadaan peradaban Nusantara (Moeljoto, 2012 : 1-3).

Pos dan Telekomunikasi di Indonesia awalnya layanan perposan

secara tradisional sudah ada sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, maupun Mataram. Hal ini bukti budaya maupun artefak serta lingustik di Indonesia. Relief pengantar pesan di candi-candi, torehan pada daun lontar, kisah Aji Saka, hingga istilah Nawala, Caraka (pengantar surat), menjadi bukti kuat bahwa layanan Pos sudah tumbuh berkembang di Nusantara (Departemen Perhubungan -Direktorat Jenderal POS dan Telekomunikasi Jilid I, 1980 : 35).

Kantor pos dan telkom Palembang yang di dirikan tahun 1928 di Raadhuisweg (Jalan Merdeka Palembang) oleh Kolonial Belanda bentuk dan arsiteknya seperti kubah pada bagian atapnya sama seperti kantor pos dan telkom di kota lainnya di daerah lainnya di Indonesia. Pada awal pendiriannya kantor Pos dan Telkom Palembang menjadi bagian pelayanan satu atap karena di satu kantor terdiri dari beberapa pelayanan yaitu pos, telegram dan telekomunikasi.

Sejak tentara Jepang masuk ke Sumatera pada tanggal 13 Maret 1942 sampai kira-kira bulan April 1942, disusunlah organisasi Jawatan PTT. PTT adalah Organisasi Dinas Pos, Telegraf dan Telepon. PTT yang berpusat di Singapura yang ketika itu dinamakan Shonan (*Ghunseikanbu*). Sebagai Cabang pusat untuk pulau Sumatera didirikan 3 kantor "*Denseisyo*" yang berkedudukan di Medan untuk daerah Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur. Di Padang untuk daerah Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Sedangkan di Palembang untuk daerah Palembang, Bengkulu, Lampung, Bangka dan Bliton (Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal POS dan Telekomunikasi Jilid I, 1980 : 141). Sentral Telepon di Palembang

telah dirusak oleh Belanda waktu Jepang masuk. Pemerintah Jepang hanya melakukan perbaikan tanpa membawa peralatan baru. Peralatan dan perlengkapan telepon yang sudah tua itu sudah waktunya diperbarui (kabel, koord, stopkontak, dan lain-lain). Sejak tanggal 1 Juli 1946 semua kawat telepon sudah dikembalikan oleh Jepang kepada PTTR. Hanya di kota Palembang mereka masih memakai beberapa sambungan, tetapi dengan izin PTTR (Departemen Perhubungan - Direktorat Jenderal POS dan Telekomunikasi Jilid II, 1980 : 129).

Sejak tanggal 11 Maret 1966 mulailah Masa Orde baru yang menutup masa demokrasi terpimpin. Pada tanggal 27 Maret 1966 dengan Keputusan Presiden No. 63 tahun 1966 dilakukan penyempurnaan lagi atas Kabinet Dwikora yang telah disempurnakan sehingga Kementerian Pos dan Telekomunikasi di ubah statusnya menjadi Departemen Pos dan Telekomunikasi yang di kepalai oleh seorang Deputy Menteri dan berada di dalam lingkungan Kementerian Perhubungan yang di pimpin oleh Menteri Perhubungan. Pada tanggal 25 Juli 1966 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 Kabinet Dwikora di bubarkan dan sebagai gantinya dibentuk Kabinet Ampera. Di dalam Kabinet Ampera Departemen Pos dan Telekomunikasi di ubah statusnya menjadi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan berada di dalam lingkungan Departemen Perhubungan (Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal POS dan Telekomunikasi Jilid V, 1980 : 15).

Keadaan Pos cabang Palembang pada awal Orde Baru masih memprihatinkan. Pendirian-pendirian Pos banyak yang tidak memenuhi syarat dan banyak di pakai ruangan-ruangan sewaan. Dengan demikian Dinas Pos tidak dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan maka sejak awal orde baru melalui pelita, Pemerintah membangun Kantor Pos dan Giro dan menambahkan sarana alat angkut baik roda dua ataupun roda empat. Di samping pembangunan sarana fisik juga pendidikan dan keterampilan ditingkatkan melalui kursus di dalam ataupun di luar negeri. Dengan usaha-usaha peningkatan sarana dan keterampilan pegawai layanan jasa pos dan giro mengalami kenaikan (Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal POS dan Telekomunikasi Jilid V, 1980 : 39)

Secara garis besar tentang hakikat pos ditinjau dari sudut pandang sejarah perkembangannya, yakni Pertama, Pos lahir sebagai bagian dari kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. Kedua, Pos tumbuh seiring dengan perkembangan masyarakat dimana ia berada. Ketiga, faktor teknologi sangat menentukan peran dan perkembangan Pos di suatu masyarakat. Keempat, jika pada masa awalnya pos ditumbuhkembangkan sebagai bagian dari bagian dari organisasi kekuasaan maka pada perkembangannya mutakhir Pos berkembang lebih sebagai institusi bisnis yang dimiliki oleh negara atau bahkan masyarakat global. Kelima, manusia yang dapat dipercaya adalah inti dari institusi Pos dari zaman kapan pun dan dimanapun.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk memilih judul "Perkembangan Perseroan Terbatas Pos Indonesia Cabang Palembang Masa Orde Baru periode Pelita Tahun 1966.

Metode Penelitian

Penulis gunakan adalah metode Sejarah (Metode Historis). Menurut Gottschalk dalam Herlina (2008 : 2) mengatakan yang dimaksud dengan metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Menurut Sumadi Suryabrata (1988 :73) , Metode historis adalah cara untuk membatasi rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensistensikan bukti-bukti untuk menegakkan suatu fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Metode sejarah dalam pengertiannya secara umum adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perpektif historik (Abdurrahman, 2011 : 103).

Metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur, atau teknik yang sistematis sesuai asas-asas dan aturan ilmu sejarah (Daliman,2002 : 27). Metode yang digunakan pada Penelitian Sejarah menggunakan metode Penelitian Kualitatif. Menurut Kartodirdjo (1982) , Metode penelitian kualitatif sering diberlakukan pada ilmu-ilmu kebudayaan (*Geiteswisschaften*) yang mencakup humaniora, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial yang bertujuan untuk menemukan gejala yang unik atau individual (*ideografis*) dan

bukan mencari hukum-hukum umum (*nomotetis*) seperti pada ilmu-ilmu alam (*Naturwissenschaften*) (Priyadi, 2012 : 2). Sedangkan konsep yang di gunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan Konsep Deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata (2003: 75) , Konsep tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Langkah-langkah penelitian sejarah antara lain, pertama Heuristik. Heuristik adalah kegiatan menghimpun jejak-jejak sejarah biasanya dilakukan diperpustakaan, tinjauan kepustakaan hanya dapat dilakukan apabila topik yang akan dipelajari telah dipilih dan dirumuskan (Sair, 2012:10). Menurut Gottschalk berdasarkan daftar bacaan beserta tempat berada sumber itu, maka harus mendatangi suatu perpustakaan (Herlina, 2008:92). Selain penelusuran buku juha dilakukan observasi dan wawancara. Kedua, Kritik sumber (Penilaian data) adalah penilaian atau tahap pengujian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dan dilihat dari sudut pandang nilai kebenaran, dengan demikian melalui sumber diharapkan agar setiap data-data sejarah diberikan hendak di uji terlebih dahulu validitas dan rehabilitasinya , sehingga semua data itu sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya bukan hasil dari suatu fantasi dan manipulasi sejarah (Daliman, 2012:66). Ketiga, Interpretasi (analisa data) adalah menetapkan makan dan saling hubungan antara fakta-fakta yang diperoleh. Keempat , historiografi atau penulisan sejarah ialah cara merekonstruksi suatu gambaran masa

lamapau berdasarkan data yang diperoleh (Kuntowijoyo, 194:89).

Hal yang sangat penting dalam suatu penulisan sejarah adalah masalah pendekatan (*approach*). Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan untuk meninjau serta mengupas suatu permasalahan, dapat ditentukan cara dalam menganalisis permasalahan, dan menjadi titik awal dalam meninjau permasalahan. (Yass, 2004 : 47).

Penggunaan pendekatan bertujuan dengan pokok pembahasan pendekatan yang penulis gunakan. Dalam penelitian yang berjudul “Perkembangan PT Pos Indonesia Cabang Palembang Masa Orde Baru Tahun 1966-1998”, penulis menggunakan pendekatan multidimensional yang menggunakan berbagai ilmu sosial seperti Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pendekatan sosial di dalam tulisan ini akan menyoroti masalah hubungan PT. Pos cabang Palembang untuk meningkatkan pelayanannya dengan masyarakat dalam perkembangan PT. Pos cabang Palembang . Dalam ilmu sosial dipinjam konsep perkembangan yaitu suatu proses perubahan yang berjalan secara terus-menerus, terdorong oleh kekuatan dari dalam maupun dari luar menuju ke arah yang lebih baik.

Menurut Miriam Budiarmo dalam Suwarno (2012 : 19) mengatakan perbedaan pokok seorang sejarawan dengan ilmu politik, adalah apabila sejarawan selalu menepi masa lampau sebagai tujuannya, maka ilmuwan politik biasanya lebih melihat ke masa depan dengan bantuan bahan mentah yang disajikan oleh sejarawan. Hal ini dilakukan oleh ilmuwan politik untuk mencari pola-pola ulangan sebagai masukan untuk

menentukan proyeksi atau membuat prediksi mengenai masa depan. Pendekatan ilmu politik dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana hubungan politik masa orde baru tahun 1966-1998 terhadap perkembangan PT. POS Indonesia pada masa itu, dan sejauh mana pengaruh politik masa itu dengan perubahan yang ada dalam tubuh PT. POS Indonesia pada masa itu.

Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan PT. POS Indonesia Cabang Palembang Masa Orde Baru periode Pelita tahun 1966

Setelah PN Postel terpisah menjadi dua perusahaan Negara yang berdiri sendiri tahun 1965, yakni PN Telekomunikasi dan PN Pos dan Giro, situasi politik dan ekonomi di Indonesia sebenarnya sudah tidak mendukung bagi kelangsungan kedua perusahaan tersebut. Hal ini berpengaruh di Pos dan Giro di berbagai Cabang di Indonesia, termasuk Pos Cabang Palembang. Rezim Demokrasi Terpimpin sudah di ambang kebangkrutan, sehingga sangat tidak mungkin memberikan perhatian yang memadai terhadap kelangsungan kedua perusahaan yang baru dipisah. Kondisi ekonomi dan bisnis juga sudah sangat buruk, yang tidak memungkinkan kedua perusahaan tersebut beroperasi secara normal, apalagi meraup laba. Dengan menghadapi situasi seperti itu, kedua perusahaan harus bekerja keras agar dapat bertahan hidup di tingkat yang paling mendasar. Inilah yang menjadi tantangan terbesar PN Pos dan Giro. Tantangan ini menjadi penuh resiko karena problem besar itu harus dihadapi justru pada saat

memulai lembaran baru sebagai Perusahaan Negara tersendiri.

PTT atau PN Pos dan Giro Cabang Palembang pada dasarnya adalah pengelolaan usaha dalam bidang pengiriman surat, paket dan pengiriman uang. Keterbatasan untuk mengelola bisnis pos dan giro itu sudah terbukti mengakibatkan defisit yang sangat tinggi pada masa Demokrasi Terpimpin. Situasi memang berubah pada masa Orde Baru. Hal ini dikarenakan prioritas pemerintah lebih tertuju pada keluasan jangkauan layanan pos melalui penambahan kantor-kantor pos pembantu di Kota-kota, termasuk Kota Palembang. Kendati demikian, jajaran PN Pos dan Giro tak mengendorkan semangatnya untuk menciptakan kinerja terbaik yang dapat diukur dari laba usaha yang terus meningkat (Wawancara dengan Sudharto Hadi, 20 Maret 2015).

Bisa dilihat dari tujuan dalam PP No. 9/1978 tentang Pos, maka usaha pelayanan pos dan giro cabang Palembang diletakkan pada fungsi yang sangat strategis yaitu "mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat." Makna penting kalimat ini adalah meletakkan pos dan giro cabang Palembang sebagai instrumen untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi antar anggota masyarakat melalui pelayanan pengiriman berita tertulis, paket dan pengiriman uang. Fungsi ini sangat strategis karena mencerminkan peningkatan pembangunan, ketahanan nasional dan tercapainya masyarakat adil dan makmur (PP No 9/1978, <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20426/node/91/pp-no-9-tahun-1978-perusahaan-umum-pos-dan-giro>, di akses 25 Maret 2015)

Dengan demikian, pengabdian Perum pos dan giro cabang Palembang pada dasarnya tidak semata-mata untuk menghasilkan keuntungan. Jauh lebih penting dari itu adalah pengabdian dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan ketahanan nasional. Kemakmuran masyarakat dapat dilihat antara lain, dari frekuensi pengiriman pos dan giro cabang Palembang yang semakin meningkat setelah adanya pos kilat, surat kilat dan layanan-layanan pos lainnya pada pada orde baru (Wawancara dengan Bapak Suwondo, 23 Februari 2015).

Pada tahun 1980-an, teleks dan telegram mulai tidak berfungsi dan digantikan *faksimili*. Faksimili bertahan cukup lama, dari tahun 1980 - 1990 dikenal sebagai era "Revolusi Faksimili". Pada era itu boleh di bilang pemasukan telepon dan faksimili di Palembang sedang mencapai puncaknya, sementara berbagai alat komunikasi berbasis Internet mulai bermunculan dan makin populer.

Perkembangan selanjutnya, Pada tahun 1990-an surat elektronik atau email mulai populer. Hal ini diikuti dengan berdirinya warung internet. Saat itu, internet belum massal seperti sekarang yang digunakan untuk mengakses dan berbagi kabar melalui *e-mail*. Tentu saja hal ini berdampak pada praktik surat-menyurat yang menggunakan kertas surat dan amplop. Selain pesannya bisa disampaikan real time, email juga mengusung ongkos yang relatif murah dan bahkan boleh dibilang gratis. Dengan sistem blast, pesan email juga bisa langsung di kirim ke banyak alamat (Kartajaya , 2012 : 9).

Modernisasi peralatan dan pelayanan sudah dilakukan dalam

rangka mendorong efisiensi dan percepatan pengiriman surat, wesel dan paket. Sementara itu, kinerja keuangan juga cukup menjanjikan. Belum lagi infrastruktur jaringan kantor pos yang sudah menjangkau seluruh kecamatan. Ini semua menandakan bahwa Perum Pos dan Giro Cabang Palembang mempunyai kesiapan cukup untuk berperan ganda. Pertama, tetap menjalankan misi pelayanan umum sebagaimana diamanatkan oleh negara. Kedua, Perum Pos dan Giro Cabang Palembang sudah mempunyai kesiapan untuk masuk dalam bisnis pengiriman secara lebih mendalam. Juga, kesiapan untuk berkompetensi secara adil dengan pelaku usaha pengiriman lainnya baiknya yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan agar gerak langkah Perum Pos dan Giro Cabang semakin gesit maka yang diperlukan adalah perubahan status hukum menjadi Persero (Wawancara dengan Sudharto Hadi, 20 Maret 2015).

Tuntutan ini ternyata direspon dengan baik oleh pemerintah. Melalui PP No. 5/1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), pemerintah mengubah status hukum Pos dan Giro dari perum menjadi Persero. Dengan pengalihan ini, maka status perum secara resmi dibubarkan dan segala hak dan kewajibannya beralih kepada persero. Selanjutnya, perusahaan persero tersebut diberi nama PT POS INDONESIA sesuai dengan anggaran dasar yang disahkan dalam akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 tentang pendirian Perusahaan Persero PT Pos Indonesia (Merpatipos, 1995 : 4) dalam Ahmad (2011) . Sehingga

Perum Pos dan Giro Cabang Palembang berubah nama menjadi PT Pos Indonesia Cabang Palembang.

Kemudian Direksi Pos mengubah logo perusahaan melalui Keputusan Direksi No. 166/DIRUT/1996 tertanggal Oktober 1996. Logo baru (terdapat di lampiran) ini merupakan pengembangan logo lama (terdapat di lampiran) yang dikombinasikan dengan semangat baru untuk menjadi sarana komunikasi kelas dunia. Logo baru itu, bertahan hingga sekarang. Logo suatu perusahaan bisa saja berubah seiring dengan perubahan diri dari perusahaan itu sendiri. Dalam perkembangan PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Palembang, logo yang mewakili diri Pos Indonesia pun berubah mengikuti perubahan yang terjadi di dalam tubuh PT. Pos Indonesia (Persero) itu sendiri. Perubahan logo yang mencerminkan hal-hal yang baru dan berubah dari tubuh PT. Pos Indonesia Cabang Palembang (Persero).

2. Fungsi PT. POS Indonesia Cabang Palembang Masa Orde Baru Periode Pelita tahun 1966

Fungsi Pos dan Giro Dalam Departemen Penerangan (1969) adalah untuk menyediakan fasilitas perhubungan Pos dan luar negeri, menyelenggarakan lalu-lintas berita melalui Pos dalam dan luar negeri, menyelenggarakan lalu lintas uang, baik untuk Pemerintah maupun untuk umum dan menyelenggarakan dinas-dinas lain, diantaranya dinas Paketpos (Ahmad, 2011 : 319)

Dengan pandangan seperti ini, maka tidak mengherankan apabila fungsi PN Pos dan Giro Cabang dipandang sebagai salah satu bentuk kelancaran fungsipemerintah itu

sendiri. Ini berarti, kelancaran lalu lintas Pos dan Giro pada dasarnya adalah salah satu misi pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan Pos dan Giro tidak hanya menjadi tanggung jawab PN Pos dan Giro semata, melainkan pemerintah turut pula bertanggung jawab. Tanggung jawab itu diwujudkan dalam dua bentuk. Pertama, institusional bidang pos dan telekomunikasi dalam sistem pemerintah, dan kedua, penyusunan program pemerintah untuk pengembangan pos .

a. Masa Kepemimpinan Oesadi (1965-1968)

Padamasa kepemimpinan Direktur Oesadi, PN dan Giro memperkenalkan produk baru layanan Pos yaitu Pos Kilat. Produk ini dapat dikatakan sebagai embrio produk inovatif yang dalam perkembangan selanjutnya makin berkembang. Pengenalan produk baru dengan prangko yang lebih mahal ini di samping untuk meningkatkan pendapat, juga dalam rangka merespon permintaan masyarakat akan layanan pengiriman surat yang lebih cepat. Permintaan itu sebenarnya sudah terlaksana oleh beberapa perusahaan otobis yang melayani trayek antar kota. Ancaman inilah yang di jawab PN Pos dan Giro dengan menerbitkan layanan kilat. Target utamanya adalah dengan menerbitkan layanan kilat. Target utamanya adalah dapat melayani *next day delivery* Merpatipos, (1973) dalam Ahmad (2011 : 337)

b. Masa Kepemimpinan R.R. Adiwinata (1968-1971)

Padamasa kepemimpinan Adiwinata, PN dan Giro memperkenalkan produk baru layanan yang diberi nama "Kilat

Khusus.” Layanan ini menggabungkan antara faktor kecepatan, sebagaimana keunggulan dalam surat kilat, dengan faktor keamanan seperti dalam surat terdaftar. Terdapat perbedaan antara surat kilat dinas biasa dengan surat kilat khusus.

c. Masa Kepemimpinan Soebagyo (1971-1976)

Pada masa kepemimpinannya, Soebagyo mencanangkan peningkatan kemampuan SDM pada setiap jenjang jabatan. Program pengembangan personal adalah pada tingkat Kepala Daerah Pos dan Giro serta Kepala Bagian. Hal ini berkaitan dengan posisi strategisnya dalam pengembangan Perusahaan di daerah-daerah. Selanjutnya di susul dengan jenjang yang lebih rendah yang pada akhirnya seluruh karyawan akan ditingkatkan wawasan dan kemampuannya. Untuk tingkat Kepala Kantor Pos, maka pendidikan manajerial menjadi prioritas utama (Wawancara dengan Bapak Sukarno, 17 Januari 2015)

Moeljoto langsung mengebrak dengan kebijakan menghapus representasi prangko dan peninjauan kembali jatah bensin untuk pegawai, dan mengubahnya dengan sistem lumpsum bulanan dengan pembayaran tunai. Lump sum adalah istilah keuangan yang berarti pembayaran yang dilakukan sekaligus dalam waktu singkat saja. Begitu juga, kebijakan pengontrakan rumah pegawai yang baru pindah, diubah menjadi lump sum. Langsung kepada pegawai yang bersangkutan. Gebrakan awal ini seakan memberi contoh bahwa efisiensi yang dilakukan tidak harus dengan memotong kesejahteraan pegawai, melainkan dapat dilakukan

dengan perubahan metode dan mekanisme yang dapat menimbulkan efisiensi. Moeljoto seperti sadar bahwa di dalam organisasi perusahaan yang besar, sumber inefisiensi terkadang berpangkal dari dari penerapan mekanisme yang justru dapat memboroskan anggaran. Karena itu, disiplin anggaran yang diterapkan terutama ditujukan pada sistem atau mekanisme yang menimbulkan biaya yang berlebihan (MerpatiPos, 1986 : 23) dalam Ahmad (2011).

d. Masa Kepemimpinan Ir. Marsoedi (1987-1995)

Ketika Marsoedi meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Perum dan Giro, kondisi perusahaan pada dasarnya relatif sudah stabil. Tolak ukur mudahnya adalah pelayanan yang diberikan sudah mulai terstandarisasi dan sudah mendapat apresiasi banyak kalangan. Kinerja usaha juga sudah sangat baik yang ditunjukkan dengan pertumbuhan laba yang terus meningkat.

Marsoedi melangkah mengurus peningkatan mutu pelayanan. Ada dua pendekatan yang digunakan. Pertama pemanfaatan teknologi untuk menemukan cara pelayanan yang lebih cepat dan lebih memuaskan bagi masyarakat. Kedua, apabila teknologi sudah siap, dapat mendukung untuk melakukan diversifikasi produk (Wawancara Bapak Supardi, 21 Februari 2015)

Seiring dengan program layanan loket terpadu, Marsoedi mulai merintis program komputerisasi layanan. Program ini diintegrasikan dengan program pelayanan terpadu. Tujuannya tidak lain untuk memperoleh bentuk loket dan sistem pelayanan yang paling efisien sekaligus mutu layanan yang terbaik.

e. Masa Kepemimpinan Ir. Cahyana Ahmadjayadi (1995-1999)

Cahyana meneruskan program yang sudah dirintis direksi sebelumnya untuk meningkatkan pendidikan formal pegawai, yakni melalui kerjasama dengan Universitas Terbuka atau mengirim langsung pegawai ke universitas guna mengikuti S2 atau S3 menurut Peraturan PT. Pos Indonesia, 1999 dalam Ahmad (2011 : 432)

Perkembangan selanjutnya, Tidak hanya produk standar yang dipasarkan, melainkan sudah ada diferensiasi. Kemudian diperkenalkan produk paket pos "Kiriman Hari Ini Sampai" (KHIS) dan paketpos "Kiriman Esok Sampai" (KES). Target pasarnya adalah korposat yang mementingkan kecepatan meskipun tarifnya lebih mahal (Merpatipos, 1996 : 12) dalam Ahmad (2011)

Nilai tambah yang diberikan untuk Surat Kilat Khusus adalah waktu tempuh tempuh antara 24 jam untuk hubungan langsung, dan 48 jam untuk hubungan tidak langsung. Di samping itu maish disediakan jejak lacak untuk mengetahui status kiriman. Sedangkan untuk Express Mail Service (EMS) atau surat kliat luar negeri, nilai tambah yang diberikan adalah fasilitas jejak lacak waktu tempuh kiriman satu sampai lima hari. Produk surat lainnya yang mulai digarap secara serius adalah Surat Bisnis Elektronik (SBE). Produk ini merupakan layanan hibrida antara transmisi data eletronik dengan antaran fisik surat. Layanan ini umumnya dipakai oleh kalangan perusahaan untuk mengirim surat-surat tagihan dalam jumlah besar. Pihak Pos akan melayani kebutuhan mulai dari

pencetakan, pelipatan, pemasukan ke sampul pengeleman hingga pengiriman ke alamat yang di tuju (Wawancara dengan Bapak Suwondo, 23 Februari 2015)

Produk pengembangan lainnya yang cukup sukses adalah Wasantara-Net. Produk ini adalah hasil kerjasama antara PT Pos Indonesia dengan PT Telkom dan STT Telkom. Jasa yang disediakan adalah kotak pos elektronik (email) yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bagi pengiriman dan penerimaan informasi.

3. Upaya Peningkatan Kualitas Layanan PT. POS Indonesia Cabang Palembang Masa Orde Baru Periode Pelita tahun 1966

Kebijakan dan langkah-langkah di bidang Pos dan Giro sebagai berikut :

- a. Memperluas fasilitas pos hingga menjangkau daerah-daerah dan masyarakat luas, antara lain kecamatan-kecamatan di Kota Palembang, daerah-daerah transmigrasi dan pemukiman baru.
- b. Bila kebutuhan jasa pos sudah mendesak untuk kelancaran pemerintah dan kegiatan sosial dan ekonomi, akan dibangun Pos perintis dengan memperhatikan tersedianya sarana angkutan.
- c. Pengembangan Dinas Pos dan Giro dengan usaha menerapkan sistem perbankan sehingga merangsang masyarakat untuk memakai jasa Giro Pos.
- d. Bidang Philateli diarahkan untuk menunjang berhasilnya program Pemerintah, antara lain dengan menerbitkan prangko bertema pendidikan kebudayaan dan

keluarga berencana (Wawancara dengan Bapak Suwondo, 23 Februari 2015).

Penambahan sepeda motor sekitar 50 buah dan kendaraan pos masing-masing untuk 30 pos keliling untuk semua desa dan pos keliling kota angkutan lokal pos serta pengadaan peralatan kantor diperlukan untuk meningkatkan dan memperlancar pelayanan Pos dan Giro. Pelayanan yang lebih baik bagi penduduk kota Palembang akan diberikan dengan menambah bis Surat sebanyak sekitar 50 buah. Sasaran tersebut dapat memperluas jaringan pelayanan dan meningkatkan kemudahan pelayanan, terutama di daerah Pedesaan, daerah transmigrasi dan pemukiman baru di Palembang. Dari segi pelayanan sudah mulai dengan pembukaan loket-loket yang lebih banyak, memperbanyak bis surat dan pos keliling serta pembukaan kantor pos pembantu. Dari segi pengolahan yang menyangkut aktivitas pensortiran, pengantangan/penutupan kiriman, sudah mulai dipermudah dengan kampanye kode pos dan mekanisme terbatas. Sementara dari segi pengangkutan, kerjasama dengan pengantaran, diterapkan standar antara yang di kenal dengan "tiga-dua-satu". Artinya : dalam satu hari, kantor pos harus mengantarkan surat kilat khusus tiga kali, surat kilat dua kali dan surat biasa satu kali. Pola ini diterapkan secara nasional mulai tahun 1986 (Wawancara dengan Bapak Sukarno, 17 Januari 2015)

Kerja keras dalam meningkatkan mutu pelayanan ini pada akhirnya membuahkan hasil. Menurut survey yang dilakukan majalah *Tempo* (8 Januari 1983) pelayanan Pos dan Giro menempati

peringkat pertama untuk kategori pelayanan yang dilakukan instansi pemerintah. Sementara itu, harian *Kompas* (21 Februari 1985) memberikan apresiasi yang sangat baik terhadap kualitas layanan pos, dan yang sangat baik terhadap kualitas layanan pos, dan kecepatan tanggapan atas keluhan masyarakat (Merpatipos, 1991 : 48) dalam Ahmad (2011).

Simpulan

1. Perkembangan Pos dan Giro Cabang Palembang dimulai pada tahun 1967 dengan instruksi Presiden dengan pengelompokan tersebut PN Pos dan Giro masuk dalam kategori Perum. Kemudian pada Maret 1978 PN Pos dan Giro Cabang Palembang berubah menjadi Perum Pos dan Giro Cabang Palembang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9/1978. Pembaharuan Undang-Undang Pos kemudian dilaksanakan lagi pada tahun 1984. Setelah melalui PP No. 5/1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), pemerintah mengubah status hukum Pos dan Giro dari perum menjadi Persero. Selanjutnya, perusahaan persero tersebut diberi nama PT POS INDONESIA sesuai dengan anggaran dasar yang disahkan dalam akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 tentang pendirian Perusahaan Persero PT Pos Indonesia Sehingga Perum Pos dan Giro Cabang Palembang berubah nama menjadi PT Pos Indonesia Cabang Palembang.

2. Fungsi PT Pos Indonesia Cabang Palembang adalah untuk menyediakan fasilitas perhubungan Pos dan luar negeri, menyelenggarakan lalu-lintas berita melalui Pos dalam dan luar negeri, menyelenggarakan lalu lintas uang, baik untuk Pemerintah maupun untuk umum dan menyelenggarakan dinas-dinas lain, diantaranya dinas Paketpos. Masa Orde baru 1965-1998 Pos banyak mengeluarkan produk layanan. Masa Kepemimpinan Oesadi (1965-1968) memperkenalkan produk baru layanan Pos yaitu Pos Kilat. Masa Kepemimpinan R.R. Adiwinata (1968-1971) memperkenalkan produk baru layanan yang diberi nama "Kilat Khusus." Pada Masa Kepemimpinan Soebagyo (1971-1976), mencanangkan peningkatan kemampuan SDM pada setiap jenjang jabatan. Masa Kepemimpinan Moeljoto (1977-1987) menerapkan, Kode Pos dan standarisasi sampul surat. Masa Kepemimpinan Ir. Marsoedi (1987-1995) melakukan Pembangunan loket layanan terpadu Pos meliputi pembenahan desain loket, pembenahan konfigurasi pelayanan dan pembenahan sistem pelayanan secara keseluruhan. Masa Kepemimpinan Ir. Cahyana Ahmadjayadi (1995-1999) mengeluar fungsi layanan "Kiriman Hari Ini Sampai" (KHIS), paketpos "Kiriman Esok Sampai" (KES), Surat Kilat Khusus Express Mail Service (EMS), surat elektronik (ratron). Produk pengembangan lainnya yang cukup sukses adalah Wasantara-

Net. Produk ini adalah hasil kerjasama antara PT Pos Indonesia dengan PT Telkom. Jasa yang disediakan adalah kotak pos elektronik (email).

3. PT Pos Indonesia Cabang Palembang meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan murah bagi seluruh masyarakat yang tinggal di kota harus terus di tingkatkan. Efektifitas dan pengawasan dalam penyelenggaraan dinas-dinas pos merupakan hal yang tidak boleh di abaikan. Untuk itu, dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan dinas Pos di Palembang, perluasan jaringan Pos kilat, pendayagunaan Dinas Pos Transit Ambulans, peningkatan pelayanan di pedesaan, perluasan dan penyempurnaan dinas Giro dan cekpos dan penyempurnaan pengawasan serta pengamanan terhadap pelaksanaan dinas.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Dudung. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Ahmad, Imam. Dkk. (2011). *Melayani Rakyat Menjaga Negara Sejarah Sosial, Politik dan Ekonomi PT Pos Indonesia (Persero)*. Jakarta : Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia dan PT Pos Indonesia (Persero).
- Daliman. (2012). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

- Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal POS dan Telekomunikasi. (1980). *Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Jilid 1 Masa Pra Kolonial*. Bandung : C.V. Cahaya Makmur.
- Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal POS dan Telekomunikasi. (1980). *Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Jilid II Masa Perang Kemerdekaan 1945-1949*. Bandung: C.V. Cahaya Makmur.
- Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal POS dan Telekomunikasi. (1980). *Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Jilid V Masa Orde Baru*. Bandung: C.V. Cahaya Makmur.
- Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kelembagaan PT. Pos Indonesia (Persero), dalam www.bumn.go.id (di akses 25 Agustus 2014.)
- Herlina , Nina. (2008). *Metode Sejarah* . Bandung: Satya Historika.
- Herlina , Nina. (2009). *Historiografi Indonesia Dan Permasalahannya* . Bandung: Satya Historika.
- <http://palembangdalamsketsa.blogspot.com/2007/11/kantor-pos-besar-merdeka-palembang.html>, (di akses 18 Agustus 2014).
- Id.wikipedia.org/wiki/Pos_Indonesia (diakses 18 Agustus 2014).
- Kartajaya, Hermawan. (2012). *Marketing For Turnaround Realizing the Network Company*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirjo, Sartono. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljoto. (2012). *Sejarah Pos di Mancanegara*. Bandung : Paramedia Komunika bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia.
- Sair, Alian. (2012). *Criksetra Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah*.Palembang: FKIP Sejarah Universitas Sriwijaya
- Sjamsuddin ,Helius. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Suryabrata, Sumadi. (2003). *Psikologi Pendidikan* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemitro, Rochmat. (1993). *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung : PT. Eresco.
- Suwarno. (2012). *Sejarah Politik* . Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- PP. No.9, 1978. <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20426/node/91/pp-no-9-tahun-1978-perusahaan-umum-pos-dan-giro> (di akses 25 Maret 2015)
- Prasetya, Rudhi. (1996). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti.

Prasetya, Rudhi. (2011). *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.

Priyadi, Sugeng. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

PT. Pos Indonesia, Visi dan Misi PTI. Pos Indonesia (Persero), dalam www.pos.go.id (diakses 15 Oktober 2014)

Dewi Setyawati, *Perkembangan PT. Pos...*

Yass, Marzuki AB. (2004). *Metodologi Sejarah dan Historiografi*. Palembang: Universitas Sriwijaya.